



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENYUSUN	4
GLOSARIUM.....	5
PETA KONSEP.....	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Hakikat Demokrasi	9
A. Tujuan Pembelajaran.....	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Penugasan Mandiri (optional).....	13
E. Latihan Soal	14
F. Penilaian Diri	16
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	17
Klasifikasi Demokrasi.....	17
A. Tujuan Pembelajaran.....	17
B. Uraian Materi	17
C. Rangkuman	18
D. Penugasan Mandiri (optional).....	19
E. Latihan Soal	19
F. Penilaian Diri	22
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	23
Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila	23
A. Tujuan Pembelajaran.....	23
B. Uraian Materi	23

C. Rangkuman	25
D. Penugasan Mandiri.....	25
E. Latihan Soal	26
F. Penilaian Diri	29
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	30
Dinamika Demokrasi di Indonesia	30
A. Tujuan Pembelajaran.....	30
B. Uraian Materi	30
C. Rangkuman	34
D. Penugasan Mandiri (optional).....	35
E. Latihan Soal	35
F. Penilaian Diri	38
EVALUASI	39
DAFTAR PUSTAKA.....	44



SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

PPKn KELAS XI

PENYUSUN

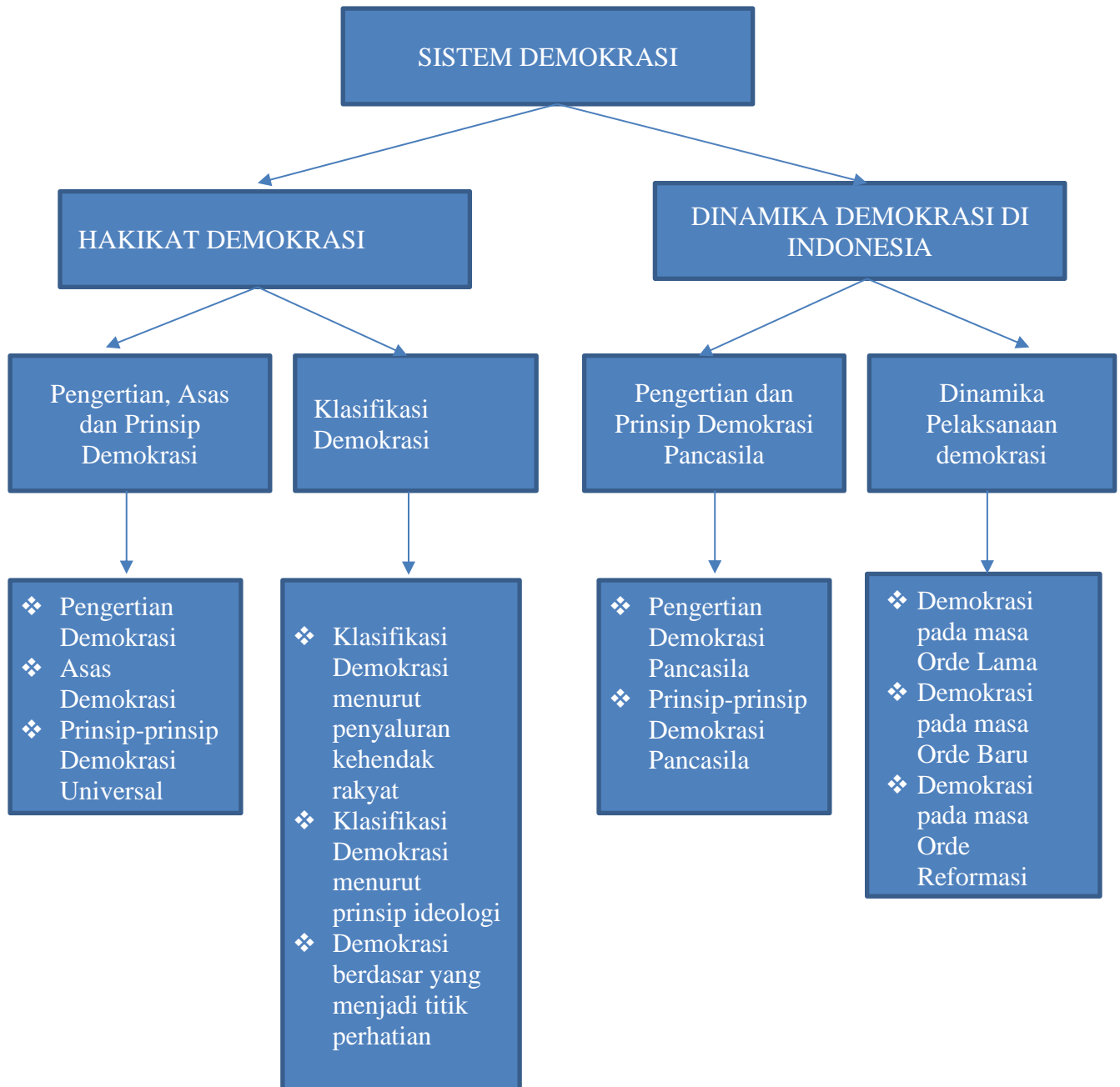
RIZANUR, M.Pd

SMAN 29 JAKARTA

GLOSARIUM

Demokrasi	Suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik
Demokratisasi	Proses menuju demokrasi
Ideologi	ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan
Partai politik	organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama
Pemilu	proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Kudeta	berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "pengambil alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan <u>negara</u> dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.2 Mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Didalam modul ini terdapat materi hakikat demokrasi, yang berisi tentang pengertian, klasifikasi, asas dan prinsip demokrasi. Modul ini pun membahas materi tentang dinamika demokrasi Pancasila, yang berisi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dari mulai berdirinya negara di tahun 1945 sampai sekarang, yang terbagi atas tiga masa, yaitu masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pada akhirnya, tidak ada negara yang berharap mendapat stempel buruk sebagai negara yang tidak demokratis, semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menjadi negara yang demokratis.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.

4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang hakikat demokrasi.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Hakikat Demokrasi

Kedua : Klasifikasi Demokrasi

Ketiga : Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila

Keempat : Dinamika Demokrasi di Indonesia

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Hakikat Demokrasi

Pengertian, Asas dan Prinsip Demokrasi

A. Tujuan Pembelajaran

Pelajari materi pada kegiatan pembelajaran 1, kemudian setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini, kalian akan mampu menjelaskan hakikat demokrasi, dimulai dari pengertian secara etimologis maupun menurut pendapat para ahli, kemudian asas, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Selain itu, kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil analisis tentang nilai-nilai demokrasi di lingkunganmu.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Demokrasi

Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa persoalan ini begitu penting kita pelajari ? ya, karena setiap negara di dunia tidak ada satupun yang ingin di cap sebagai negara yang tidak demokratis. Mereka berusaha untuk menerapkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegaranya masing-masing. Ada yang menyatakan negara yang modern adalah negara yang menerapkan demokrasi di negara tersebut, artinya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan terhadap jaminan harkat dan martabat manusia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dua asas ini menjadi pondasi pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah/negara ini ? adakah kebebasan warga negara di dalam menyampaikan pendapat di muka umum ? bagaimana dengan kebebasan pers ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang demokrasi ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.



Marilah kita mulai dengan mengenal istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang

partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda. Kita ketahui China sampai saat ini masih menerapkan demokrasi komunis sementara Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya dan Indonesia dengan demokrasi Pancasilanya. Masing-masing negara mengimplementasikan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kondisi negaranya.

Hampir sebagian besar negara didunia berupaya menjadi negara yang demokratis, dimana pemerintahan dibangun berdasar kehendak rakyat, atau menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan negara. Sebagai sebuah kondisi ideal demokrasi tentu tidak mudah untuk diwujudkan, karenanya semua membutuhkan proses. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi dapat menjadi jalan untuk keluar dari diktatorisme maupun otaritarisme, karena proses ini akan mengembalikan hak-hak rakyat. Demokratisasi tidak hanya mencakup masalah politik saja akan tetapi juga masalah ekonomi, budaya dan sosial juga pertahanan keamanan, kesemuanya dapat mengalami proses demokrasi. Karenanya dukungan rakyat sangat diperlukan dan sekaligus dapat menentukan apakah proses berjalan dengan baik atau tidak.

2. Asas Demokrasi

Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas- asas demokrasi, adapun asas ada 2 , yaitu :

- 1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi didalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengakuan harkat dan martabat manusia
Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 s/d 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

Selain asas kita juga dapat mengenali ciri pemerintahan yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu :

- 1) Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
Berdasarkan ciri ini maka dapat diidentifikasi ciri-ciri :
 - a. Konstitusional
Prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat di atur dalam konstitusi
 - b. Perwakilan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat walaupun kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada anggota DPR
 - c. Pemilu
Salah satu indikator yang dijadikan parameter terhadap demokratis atau tidak demokratisnya suatu negara adalah adanya penyelenggaraan pemilu atau tidaknya disuatu negara. Jika negara menyelenggarakan pemilu maka negara tersebut dikatakan demokratis dan demikian sebaliknya.
 - d. Partai politik

Partai politik dijadikan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dikarenakan partai politik memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan kunci bagi perkembangan demokrasi di suatu negara.

- 2) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
Paham pemisahan kekuasaan telah kita pelajari berdasarkan pemikiran John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica. John Locke melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan federatif sedangkan Montesquieu melakukan pemisahan kekuasaan negara atas : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah agar tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan badan kekuasaan lain yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Konsep pembagian kekuasaan di anut oleh Indonesia karena antar lembaga negara masih diperlukan kerja sama antar lembaga negara.
- 3) Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
Sebagai wujud akuntabilitas publik pemerintah adalah dengan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah diambil kepada rakyat.

3. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku Universal

Hampir semua definisi tentang demokrasi semata-mata mengenai demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan, hal ini tentu kurang tepat. Menurut Prof. Mr. A.W. Bonger demokrasi dapat dijumpai di luar lapangan ketatanegaraan, misalnya di dalam dunia perkumpulan/organisasi yang merdeka.

Demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan sesuatu kolektivitet berpemerintahan sendiri, dimana sebagian besar anggota-anggotanya turut ambil bagian dengan tidak mempersoalkan apakah ini suatu pergaulan hidup paksaan seperti negara atau perkumpulan yang merdeka. Setiap komunitas, bagaimanapun juga sifatnya, memang harus dipimpin, untuk dapat menjalankan tugasnya dan untuk terus hidup.

Pembangunan demokrasi suatu bangsa sudah pasti akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, karena pembangunan demokrasi ini ditentukan oleh berbagai faktor yang melingkupi negara tersebut. Pembangunan demokrasi ini akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup:

- 1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan.
Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam hal ini pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat di dalam pemerintahan karena ia menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat sekaligus menentukan kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah.
- 2) Tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara.
Tingkat persamaan yang dimaksud adalah : persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
Kebebasan yang dimaksud adalah menyangkut hak-hak yang tercakup dalam hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan didepan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan hak pribadi) dan dalam pemahaman yang mendasar hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara.
- 4) Penghormatan terhadap supremasi hukum.
Hukum adalah yang tertinggi karenanya semua warga negara tanpa kecuali harus patuh dan taat kepada hukum dan bersamaan kedudukannya didepan hukum. Janganlah politik dijadikan panglima tetapi hukumlah yang harus dijadikan panglima di negara ini agar pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa keadilan.

5) Pemilu berkala.

Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan membangun demokrasi maka pemilu dapat menjadi suatu alat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
Dalam masyarakat pasti ada perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan, dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan, ia akan lebih bisa menerima jika diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Dalam masyarakat pasti ada keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan perilaku. Untuk itu, perlu diselenggarakan suatu masyarakat terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut sebagai suatu gaya hidup, tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab disamping keanekaragaman diperlukan juga persatuan dan integrasi.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.
Dalam suatu demokrasi, umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif. Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Menurut Melvin I. Urofsky, ada 11 prinsip dasar demokrasi :

- 1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi
- 2) Pemilu yang demokratis
- 3) Federalisme pemerintah negara bagian dan lokal
- 4) Pembuatan Undang-undang
- 5) Sistem peradilan yang independen
- 6) Kekuasaan lembaga kepresidenan

- 7) Media massa yang bebas
- 8) Adanya kelompok kepentingan
- 9) Hak masyarakat untuk tahu
- 10) Kontrol sipil atas militer
- 11) Peran kelompok - kelompok kepentingan

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap negara di dunia, apapun ideologi negara itu, pasti ingin dianggap sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi
2. Demokrasi di negara itu dapat diukur berdasarkan asas, ciri, dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal.
3. Demokrasi memiliki dua asas, yaitu : pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan harkat dan martabat manusia.
4. Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu : pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif.
5. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan pemilu berkala.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Penugasan mandiri pada bab ini, kamu akan melakukan kegiatan wawancara singkat terhadap tokoh di masyarakat tentang pelaksanaan demokrasi di daerahmu. Carilah data yang lengkap mengenai hal-hal dibawah ini:

1. Tentukan tokoh-tokoh masyarakat di daerahmu yang akan diwawancara
2. Siapkan draft dan materi wawancara, baik dengan jawaban terbuka atau tertutup
3. Hasil wawancara dijadikan bahan kajian yang bermanfaat
4. Buatlah laporan hasil wawancara
5. Kamu bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi secara lengkap.
6. Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Menentukan topik wawancara
2. Menentukan narasumber/responden
3. Menyusun daftar pertanyaan
4. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar
5. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber (menggunakan alat perekam)
6. Menulis laporan hasil wawancara

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban pada huruf A, B, C, D, dan E yang Anda anggap benar

1 Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos” yang artinya....

- A. kekuasaan negara
- B. kekuasaan pemerintah
- C. pemerintahan rakyat
- D. pemerintahan berdaulat
- E. pemerintahan dalam arti luas

2 perhatikan hal-hal di bawah ini

- 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
- 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
- 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
- 4. Kekuasaan mayoritas
- 5. Tirani minoritas

pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditunjukkan oleh nomor..

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4.
- C. 3, 4, dan 5
- D. 1, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5

3 Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup

- A. keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan,
- B. tingkat perbedaan tertentu diantara warga negara,
- C. tidak adanya kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara,
- D. penegakan hukum yang sepihak
- E. pemilu yang bersifat tertutup

4 Demokrasi yang diterapkan di setiap negara berbeda-beda disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali....

- A. ideologi
- B. latar belakang sejarah bangsa
- C. budaya
- D. jumlah penduduk
- E. kehidupan sosial ekonomi

5 Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan....

- A. asas demokrasi
- B. ciri demokrasi
- C. pengertian demokrasi
- D. proses demokratisasi
- E. bentuk demokrasi

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	A
4	D
5	A

Pembahasan

1. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih kompleks demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
2. Ciri pemerintahan yang demokratis. Adapun Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu :
 1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat)
 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
 3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
3. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, yaitu mencakup: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, tingkat persamaan/kesetaraan tertentu diantara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan pemilu berkala.
4. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis, ini berarti pada setiap negara berupaya mengedepankan rakyat sebagai elemen utama dalam pemerintahan, walaupun dalam kenyataan pengertian demokrasi dapat diterjemahkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada ideologi, latar belakang sejarah bangsa, kehidupan sosial dan ekonomi maupun kultur atau budaya yang melatarbelakanginya. Tengok saja pelaksanaan demokrasi di negara kita Indonesia tentu akan berbeda dengan demokrasi yang diterapkan pada negara China maupun negara lainnya. Hal ini bergantung pada ideologi yang mendasari negara ataupun karena budaya yang berbeda.
5. Dalam pemerintahan yang demokratis diterapkan asas- asas demokrasi, adapun asas ada 2 , yaitu :

Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi didalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku.

Pengakuan harkat dan martabat manusia

Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi, yaitu pasal 27 s/d 34 UUD 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian demokrasi secara etimologis		
2.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian demokrasi menurut para ahli		
3.	Saya dapat menjelaskan tentang asas demokrasi		
4.	Saya dapat menjelaskan ciri demokrasi		
5.	Saya dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Klasifikasi Demokrasi

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menguraikan klasifikasi atau macam-macam demokrasi yang ada di dunia ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda, baik berdasarkan pada penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, maupun berdasarkan yang menjadi titik perhatian. Kalian juga diharapkan memiliki kemampuan membedakan masing-masing demokrasi sesuai klasifikasi yang ada.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang klasifikasi demokrasi di dunia berdasarkan sudut pandang yang berbeda agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang demokrasi. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa klasifikasi demokrasi itu dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : ada yang membagi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat yang melahirkan demokrasi langsung dan tidak langsung. Ada pula yang membaginya berdasarkan ideologi yang melahirkan demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat, sedangkan yang lain membagi berdasarkan yang menjadi titik perhatian, dan ini melahirkan demokrasi formal, material, dan gabungan.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami klasifikasi demokrasi yang ada di dunia dan menentukan manakah demokrasi yang terbaik yang akan digunakan oleh negara kita tercinta. Apakah demokrasi yang sudah dibangun ini sudah sejalan dengan cita-cita dan tujuan bangsa ini dibuat oleh para pendiri bangsa. Dan begitu banyak pertanyaan yang akan muncul di benak kita, yang membuat kita tak akan berhenti untuk berpikir demi kemajuan bangsa ini. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan demokrasi di Indonesia, aamiin.

Klasifikasi demokrasi yang sudah kita ketahui diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

- a. demokrasi langsung, yakni demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani Kuno, tepatnya di Sparta dan Athena dengan membentuk polis atau negara kota. Ini bisa terjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini, masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks, dan jumlah anggota negara kota masih terbilang sedikit.
- b. Demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah, contoh yang paling mudah adalah negara kita sendiri, Indonesia. Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan UU Pemilu, berapa quota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif

2. Atas dasar prinsip ideologi

Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi :

- a. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

b. Demokrasi rakyat (demokrasi komunis)

Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.

3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya

Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas:

a. Demokrasi Formal (negara-negara liberal)

Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara Barat, seperti : Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya.

b. Demokrasi Material (negara-negara komunis)

Yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, dimana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah : RRC, Korea Utara, Rusia.

c. Demokrasi Gabungan (negara-negara non blok)

Yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan adalah : Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Macam-macam demokrasi didasarkan atas tiga sudut pandang yang berbeda, yakni

1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan yang menjadi titik perhatian. Berdasarkan sudut pandang penyaluran kehendak rakyat dikenal dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung/perwakilan.
2. Berdasarkan sudut pandang prinsip ideologi dikenal dua macam demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat.
3. Berdasarkan sudut pandang yang menjadi titik perhatian dikenal tiga macam demokrasi, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan.

Negara Republik Indonesia masuk dalam klasifikasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi tidak langsung, dan berdasarkan sudut pandang yang menjadi titik perhatian, yaitu demokrasi gabungan.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari Koran atau internet yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari negarayang menganut sistem demokrasi. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini :

SISTEM DEMOKRASI		
No.	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Latihan Soal

- Dipandang dari penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi terbagi atas ...
 - Langsung dan tidak langsung
 - Positif dan negatif
 - Formal dan material
 - Gabungan dan individu
 - Umum dan khusus
- Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi Negara Korea Utara menganut ideologi yang bersifat tertutup yakni...
 - fasis
 - sosialis
 - liberal
 - komunis
 - Pancasila
- Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas..
 - Formal, material, gabungan
 - Langsung dan tidak langsung
 - Konstitusional dan rakyat
 - Terbuka dan tertutup

E. Umum dan khusus

4. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan
 - A. tanggap terhadap kepentingan bersama
 - B. pengakuan harkat dan martabat manusia
 - C. tidak diskriminasi terhadap warga negaranya
 - D. memiliki wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan
 - E. memiliki undang-undang dan badan penegak hukum

5. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan...
 - A. persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
 - B. kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
 - C. kebebasan parpol dan pembatasan parpol
 - D. sistem banyak partai dan sistem dua partai
 - E. sistem presidensial dan sistem parlementer

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	A
2	D
3	A
4	B
5	B

Pembahasan

1. Klasifikasi demokrasi Menurut cara penyaluran kehendak rakyat , demokrasi dibedakan atas :
 - A. Demokrasi langsung
rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara.
 - B. Tidak langsung
demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, artinya rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu

2. Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi :
 - A. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
 - B. Demokrasi rakyat (demokrasi komunis)
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut *Mr. Kranenburg* demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan *Miriam Budiardjo*, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.

3. Berdasar titik berat yang menjadi perhatiannya demokrasi dapat dibedakan atas:
 - A. Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara Barat, seperti : Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya.
 - B. Demokrasi Material (negara-negara komunis)
Yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, dimana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah : RRC, Korea Utara, Rusia.

C. Demokrasi Gabungan (negara-negara non blok)

Yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan adalah : Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

4. Setiap negara demokrasi harus memenuhi 2 asas pokok, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan tanggung terhadap kepentingan bersama
5. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan kepentingan masyarakat dan kebebasan individu

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan macam-macam demokrasi		
2.	Saya dapat membedakan demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung		
3.	Saya dapat menjelaskan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi		
4.	Saya dapat menjelaskan demokrasi berdasarkan yang menjadi titik perhatian		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Pengertian dan Prinsip Demokrasi Pancasila

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengetahui demokrasi yang dilaksanakan di negara tercinta ini, apalagi kalau bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasarkan pada sila keempat dan dijiwai oleh sila-sila lainnya ini tak mudah dilaksanakan di dalam perjalanan bangsa ini. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila ke empat dari Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya. Dengan kata lain demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sebelum kita lebih jauh marilah kita perhatikan Pengertian Demokrasi Pancasila menurut para ahli dibawah ini :

a. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.

Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prof, Dardji darmodihardjo,SH,

Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945

c. Sri Soemantri

Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.

- d. Prof. DR. Hazairin, SH
Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968 adalah demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat, seperti desa, kerja, marga, nagari dan wanua..., yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Istilah "ditingkatkan" ini memiliki makna :
- 1) Peningkatan status demokrasi adat menjadi demokrasi Indonesia yang bertaraf nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia.
 - 2) Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek kedaerahan menjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan
- e. Prof.S.Pamudji menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu :
- 1) Aspek Formal
Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur.
 - 2) Aspek Material
Mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
 - 3) Aspek Normatif / Kaidah
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan
 - 4) Aspek Optatif
Mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai
 - 5) Aspek Organisasi
Mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut
 - 6) Aspek Kejiwaan
Mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara

Selain pendapat para ahli diatas tentang demokrasi pancasila, pengertian Demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas

- 1) Aspek Material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
- 2) Aspek Formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain
- 4) Mewujudkan rasa keadilan sosial,
- 5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
- 6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- 7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Demokrasi Pancasila yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila ke empat dari Pancasila, padahal seharusnya diliputi oleh sila lainnya karena ia merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pengertian Demokrasi Pancasila dapat dibedakan atas : aspek material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial, dan dalam aspek formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
4. Adanya 7 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu : persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi Demokrasi Pancasila, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian yang berkaitan dengan pernyataan tentang Demokrasi Pancasila !

No	Demokrasi Pancasila	Uraian
1.	Aspek material	
2.	Aspek formal	
3.	Aspek Kejiwaan	
4.	Aspek optatif	
5.	Aspek Normatif	

E. Latihan Soal

Pilihlah jawaban yang tepat dari soal dibawah ini !

1. Yang bukan aspek demokrasi Pancasila menurut Prof.S.Pamudji adalah.....
 - A. formal
 - B. kejiwaan
 - C. normatif
 - D. fisik
 - E. organisasi

2. Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pernyataan ini adalah di sampaikan oleh...
 - A. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
 - B. Prof, Dardji darmodihardjo,SH,
 - C. Sri Soemantri
 - D. Prof. DR. Hazairin, SH
 - E. Prof.S.Pamudji

3. Demokrasi Pancasila dapat dibedakan menurut aspek material dan aspek formal. Yang di maksud dengan aspek material adalah..
 - A. demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
 - B. Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat
 - C. paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
 - D. Demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945
 - E. pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia

4. Contoh sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah.....
 - A. Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
 - B. Menerima saja karena telah diputuskan oleh pimpinan.
 - C. Mengakui dengan senang hati dan tanggung jawab.
 - D. Menerima karena sudah menjadi kebiasaan rapat.
 - E. Menerima dan menjalankan dengan tanggung jawab.

5. Perhatikan hal-hal berikut
 1. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
 2. keseimbangan antara hak dan kewajiban,
 3. pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain,
 4. mewujudkan rasa keadilan sosial,
 5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat,
 6. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan,
 7. menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

Yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah..

- A. 1, 2, 3, dan 5
- B. 2, 3, 4, dan 6
- C. 3, 4, 5 dan 7
- D. 2, 3, 4, dan 6
- E. 4, 5, 6, dan 7

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	D
2	A
3	A
4	A
5	D

Pembahasan

1. Prof.S.Pamudji menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu :
 - a. Aspek Formal
Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam Badan Perwakilan Rakyat dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur.
 - b. Aspek Material
Mempersoalkan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
Aspek Normatif / Kaidah
Mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan
 - c. Aspek Optatif
Mengetengahkan tujuan atau kehendak yang akan dicapai
 - d. Aspek Organisasi
Mengetengahkan wadah pelaksanaan demokrasi tersebut
 - e. Aspek Kejiwaan
Mengetengahkan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara
2. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH.
Demokrasi pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berketuhanan Yang maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas
 1. Aspek Material (substansi/isi), demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
 2. Aspek Formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
4. sikap terhadap putusan musyawarah yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah Menghormati dan menerimanya dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab
5. Adanya 7 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu : persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila		
2.	Saya dapat menguraikan makna demokrasi Pancasila menurut para ahli		
3.	Saya dapat membedakan demokrasi Pancasila berdasarkan aspek formal dan material (substansi/isi)		
4.	Saya dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Dinamika Demokrasi di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri terkait penerapan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan di dalam penerapan demokrasi yang pernah dilakukan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan maupun kekurangan yang terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia tercinta ini ? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi ? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kalian mengingat kembali pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baik, setelah kita mengingat kembali pengertian demokrasi pancasila marilah kita perhatikan uraian pelaksanaan demokrasi di Indonesia padamasa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Demokrasi pada masa orde lama

Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, pemerintahan menjadi lebih demokratis dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah :

- 1) Penyimpangan ideologi
- 2) pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden
- 3) Mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS no.III/MPR/1963
- 4) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR-GR
- 5) Hak budget DPR tidak berfungsi
- 6) Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi “poros Jakarta-Peking”.

2. Demokrasi pada masa orde baru

Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 (SUPERSEMAR), dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan orde baru. Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat , bangsa dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan tekad orde baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Namun tekad tersebut ternyata

hanyalah isapan jempol belaka dikarenakan maraknya penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi, seperti :

- 1) berkurangnya kontrol sipil terhadap militer
- 2) sistem peradilan yang kurang independen
- 3) pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis
- 4) kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif
- 5) peran media massa yang terbatas
- 6) tekanan terhadap kelompok kepentingan
- 7) perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas

3. Demokrasi pada masa reformasi

Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain :

- 1) kemerdekaan pers
- 2) kemerdekaan membentuk parpol
- 3) terselenggaranya pemilu yang demokratis
- 4) pembebasan Napol dan Tapol
- 5) otonomi daerah
- 6) kebebasan berpolitik

Untuk lebih memperjelas pemahaman kita akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, perhatikanlah tabel pelaksanaan demokrasi dibawah ini ;

No	Landasan	Masa berlaku	Nama Demokrasi	Pengertian	Ciri-ciri umum	Keterangan
1	Maklumat pemerintah tgl.3 Nov 1945 a) Konstitusi RIS 1949 b) Konstitusi UUD 1950	November 1945 s.d. Juli 1959	Liberal	Paham yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya.	a) Adanya golongan mayoritas/minoritas b) Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi dan demonstrasi serta multi partai.	Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kabinet sering jatuh bangun, dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam

2.	Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS/No. VIII/MPRS/1965 (sudah dicabut dengan TAP MPRS No XXXVII/MPRS/1968)	Juli 1959 s.d. April 1965 (orde lama) April 1965 s.d. Maret 1966	Pancasila Terpimpin	Paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang beritikad baik untuk mencapai mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.	<ul style="list-style-type: none"> a) adanya rasa gotong royong b) tidak mencari kemenangan atas golongan lain c) selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat d) Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner. 	Selama pelaksanaan demokrasi Pancasila dan terpimpin, kecenderungannya semua keputusan hanya ada pada pimpinan besar Revolusi. sehingga berakibat rusaknya tatanan kekuasaan negara, misal DPR dapat dibubarkan, ketua MA, MPRS menjadi menko, pimpinan partai banyak yang ditangkap, dsb.
----	---	---	----------------------------	--	---	--

<p>3.</p>	<p>Supersemar (11-3-1966) dan Tap MPRS No. XXXVII/MPRS 1968 (selanjutnya diperkuat dengan Tap MPRS No. I/MPR/1973, 1978 dst)</p>	<p>Maret 1966 s.d. Mei 1998 (orde baru)</p>	<p>Pancasila</p>	<p>Paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan . Yang dilaksanakan dengan rahmat Tuhan YME, serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan musyawarah mufakat b. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain d. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan e. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah f. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur g. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 	<p>Pelaksanaan demokrasi pancasila masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umumnya. Hal tersebut karena Presiden begitu dominan baik dalam supra maupun infra struktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.</p>
-----------	--	---	------------------	---	--	---

4.	Tap MPR No.VII/MPR /1998 jo TAP MPR No.X/MPR/ 1998 jo TAP MPR No.II/MPR/ 1999	Mei 1998 s.d. sekarang	Pancasila Reformasi	S.D.A	Selain ciri-ciri diatas (demokrasi pancasila) juga lebih ditekankan pada: a) penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan b) pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif penghormatan kepada keragaman asas, ciri, aspirasi dan program parpol yang multi partai.	Pelaksanaan demokrasi pancasila (reformasi) telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif , amandemen dst
----	---	------------------------	---------------------	-------	--	---

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama atau masa demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945
2. Pelaksanaan demokrasi di masa orde barupun, yang niat awalnya ingin melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen, ternyata juga tak jauh berbeda.
3. Harapan yang ada tinggal demokrasi pada masa reformasi, apakah demokrasi ini akan benar-benar diterapkan pada masa sekarang ini, mungkin kita memiliki persepsi dan opini masing-masing, tetapi harus diakui secara umum demokrasi sudah lebih baik, namun pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara RI.

D. Penugasan Mandiri (optional)

Penugasan mandiri pada materi ini, kamu akan melakukan perbandingan pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi dengan memberikan tanda (√) jika jawaban dianggap baik, dan memberikan tanda (X) jika jawaban dianggap kurang baik berdasarkan tabel dibawah ini:

NO	MATERI	ORDE LAMA	ORDE BARU	ORDE REFORMASI
1	Partisipasi rakyat			
2	Kebebasan Pers			
3.	Pelanggaran HAM			
4.	Pelaksanaan pemilu			
5	Kebebasan berpolitik			

E. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari soal dibawah ini !

1. Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini!

- 1) Pengekangan hak di bidang politik
- 2) Pembatasan wewenang Presiden
- 3) Pengangkatan Presiden seumur hidup
- 4) Adanya program penembakan misterius dalam menciptakan keamanan
- 5) Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden

Dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan nomor

- A. 1), 2), 3)
- B. 1), 2), 4)
- C. 1), 3), 5)
- D. 2), 3), 4)
- E. 3), 4), 5)

2. Demokrasi pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pemerintahan orde baru adalah....

- A. Pemerataan pendapatan
- B. Pemekaran wilayah
- C. Perubahan UUD1945
- D. Pemilu yang demokratis
- E. Keamanan dalam negeri stabil

3. Ciri utama demokrasi pada masa reformasi adalah

- A. Pelaksanaan demokrasi tertuang pada kunci pokok sistem pemerintahan
- B. Adanya konsensus/persetujuan umum
- C. Eksekutif lebih dominan dalam pengambilan keputusan
- D. Banyaknya partai politik dan kebebasan pers
- E. Birokrat benar-benar melaksanakan kebijakan pemerintah

4. Demokrasi liberal pernah dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1950-1959, pada masa pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Hal negatif yang terjadi pada demokrasi liberal ini adalah...
 - A. mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam
 - B. Jumlah sekolah bertambah
 - C. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti PRRI
 - D. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya
 - E. Pers semakin tertekan

5. Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam bentuk Undang-Undang tentang pers, yaitu
 - A. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999
 - B. Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000
 - D. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1998
 - E. Undang-Undang nomor 45 Tahun 1999

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	E
3	D
4	A
5	B

Pembahasan

1. pelaksanaan demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan yang dimaksud adalah :
 - 1) Penyimpangan ideologi
 - 2) pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden
 - 3) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS no. III/MPR/1963
 - 4) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR-GR
 - 5) Hak budget DPR tidak berfungsi
 - 6) Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi “poros Jakarta-Peking”.
2. penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi, seperti :
 - 1) berkurangnya kontrol sipil terhadap militer
 - 2) sistem peradilan yang kurang independen
 - 3) pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis
 - 4) kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif
 - 5) peran media massa yang terbatas
 - 6) tekanan terhadap kelompok kepentingan
 - 7) perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas
3. Demokrasi pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi pada masa ini mulai ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik, antara lain :
 - 1) kemerdekaan pers
 - 2) kemerdekaan membentuk parpol
 - 3) terselenggaranya pemilu yang demokratis
 - 4) pembebasan Napol dan Tapol
 - 5) otonomi daerah
 - 6) kebebasan berpolitik

pada masa ini yang menjadi kelebihan demokrasi adalah berdirinya banyak partai politik yang mengikuti pemilu
4. pada masa demokrasi liberal, lebih menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, kabinet sering jatuh bangun, dan mengakibatkan instabilitas baik di bidang politik, ekonomi maupun hankam
5. Pelaksanaan demokrasi pancasila (reformasi) telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif, amandemen. Selain itu adanya Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan

mengeluarkan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Salah satunya yaitu dengan di keluarkannya UU Nomor 40 tentang Pers

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde lama		
2.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru		
3.	Saya dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde reformasi		
4.	Saya dapat membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde lama dengan orde baru		
5.	Saya dapat membedakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa orde baru dengan orde reformasi		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

Pilihlah satu jawaban yang tepat dari soal pilihan ganda di bawah ini !

1. Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan seperti yang dipraktekkan oleh negara....
 - A. Malaysia dan Australia
 - B. Amerika Serikat dan Indonesia
 - C. Inggris dan Brunei Darussalam
 - D. Perancis dan RRC
 - E. Indonesia dan India

2. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti....
 - A. pemilihan ketua kelas
 - B. menentukan ketua arisan keluarga
 - C. membentuk panitia maulid
 - D. ikut memilih dan dipilih
 - E. ikut bermusyawarah di desanya

3. Persamaan di bidang hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal....
 - A. 1 ayat 1
 - B. 7 ayat 1
 - C. 17 ayat 2
 - D. 27 ayat 1
 - E. 37 ayat 2

4. Perhatikan pernyataan berikut ini !
 1. pemerintahan berdasarkan konstitusi
 2. pemilu yang demokratis
 3. hak masyarakat untuk tahu
 4. kontrol militer terhadap sipil
 5. melindungi hak-hak mayoritasBerdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky adalah...
 - A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,3,4
 - D. 2,3,4
 - E. 3,4,5

5. Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa....
 - A. berjalannya sistem check and balances
 - B. sistem peradilan yang independen
 - C. pemerintahan berdasarkan konstitusi
 - D. hakim dilindungi oleh militer
 - E. hakim tak melihat realitas sosial

- 6 Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran....
- A. Adam Smith
 - B. Auguste Comte
 - C. Karl Marx
 - D. Benito Musolini
 - E. Adolf Hitler
- 7 Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi....
- A. material
 - B. formal
 - C. gabungan
 - D. rakyat
 - E. konstitusional
- 8 Demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan....
- A. terlalu menuntut hak
 - B. lebih mengutamakan kewajiban
 - C. memadukan kebebasan dengan kewajiban
 - D. mengagungkan kebebasan individual
 - E. mengekang kebebasan masyarakat
- 9 Demokrasi ekonomi di negara komunis adalah etatisme, sedangkan di negara liberal adalah....
- A. kerakyatan
 - B. free fight liberalism
 - C. homo homini lupus
 - D. bellum omnium contra omnes
 - E. contract social
- 10 Demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut....
- A. Prof.DR.Drs.Notonagoro, SH
 - B. Afan Gaffar
 - C. Prof.Dardji Darmodihardjo, SH
 - D. Ensiklopedi Indonesia
 - E. Prof.S.Pamudji
- 11 Perhatikan pernyataan berikut ini !
- 2. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - 3. pemilu yang demokratis
 - 4. sistem peradilan yang independen
 - 5. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
 - 6. menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional
- Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah....
- A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,2,5
 - D. 1,3,5
 - E. 1,4,5

- 12 Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah mewujudkan rasa keadilan sosialsesuai dengan sila....
 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat
 - E. Kelima
- 13 Demokrasi yang diterapkan pada masa orde baru adalah demokrasi Pancasila sedangkan demokrasi pada masa orde lama di sebut demokrasi....
 - A. formal
 - B. terpimpin
 - C. material
 - D. langsung
 - E. konstitusional
- 14 Salah satu penyimpangan pada masa orde baru adalah maraknya budaya KKN, sedangkan pada masa orde lama adalah....
 - A. politik luar negeri bebas aktif
 - B. hak interpelasi DPR tidak berjalan
 - C. pelantikan DPR hasil pemilu 1955
 - D. pembatasan masa jabatan presiden
 - E. konsepsi Pancasila menjadi Nasakom
- 15 Demokrasi pada masa orde reformasi ditandai oleh, kecuali....
 - A. kebebasan beragama
 - B. kemerdekaan pers
 - C. kemerdekaan membentuk parpol
 - D. otonomi daerah
 - E. pemilu yang demokratis
- 16 Yang bukan termasuk perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah....
 - A. membudayakan sikap terbuka
 - B. menghargai pendapat orang lain
 - C. mengutamakan kepentingan umum
 - D. mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah
 - E. mayoritas menghormati yang minoritas
- 17 Sikap toleran terhadap perbedaan dan menerima keberagaman akan membentuk kehidupan yang....
 - A. rukun, tenteram, damai dan sejahtera
 - B. rukun walau diwarnai konflik
 - C. adil dan makmur
 - D. selamat dunia dan akhirat
 - E. harmonis
- 18 Contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah adalah.....
 - A. pemilihan ketua OSIS oleh kalian, karyawan dan guru
 - B. pembagian kelompok ditentukan oleh guru
 - C. penunjukkan ketua kelas langsung oleh wali kelas
 - D. penunjukan ketua panitia Pensi oleh Pembina OSIS
 - E. pembagian tugas piket tanpa berunding

19 Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1. Keterlibatan warga negara hanya dalam pemilu
2. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
3. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
4. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara
5. Suatu sistem perwakilan

Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara universal ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 3, 4
- C. 1, 4, 5
- D. 2, 3, 4
- E. 3, 4, 5

20 Perhatikan pernyataan berikut ini !

1. pemilihan ketua RT
2. pemilihan kepala desa
3. pemilihan ketua karang taruna
4. pemilihan ketua OSIS
5. pemilihan presiden

Berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk contoh perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat adalah.....

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 1,3,4
- D. 2, 3, 4
- E. 3, 4, 5

KUNCI JAWABAN EVALUASI

KUNCI JAWABAN	
1. B	11.E
2. D	12.E
3. D	13.B
4. A	14.E
5. B	15.A
6. C	16.D
7. B	17.A
8. D	18.A
9. B	19.E
10.C	20.A

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Karya Rama & Rizanur (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jakarta : Tunas Melati

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud